

Pancasila Sebagai Asal Mula Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan

Syamsul Arifin¹ Agus H. Sulistiyono Reksoprodjo² Fauzia Gustarina Cempaka Timur³

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: syams3134@gmail.com¹ yonorex@gmail.com² fg.cempaka@idu.ac.id³

Abstract

The important role of Pancasila as an ideological root for the nation and state of Indonesia in maintaining strong national values. The purpose of this study is to analyze the role of Pancasila in shaping Indonesian national identity, identify the national values recognized by Pancasila, and describe the research methods used to collect and analyze data. This study uses historical analysis approaches and literature studies to investigate the development of the concept of Pancasila as Indonesia's main ideology. Analyzing historical texts, important speeches, and works by national figures, this research reveals the evolution and meaning of national values inherent in Pancasila. The results of the study show that Pancasila has served as the ideological foundation that underlies Indonesian national identity. Values such as unity, mutual cooperation, democracy, and belief in one and only God have proven to be the main pillars in shaping the character of the nation and state. Also revealed that Pancasila continues to be relevant in facing the challenges of modern times, which confirms Indonesia's commitment to diversity and inclusivity. The conclusion is that Pancasila has a central role in shaping and maintaining Indonesian national values. So that Pancasila remains a strong foundation to guide the direction of the development of the Indonesian nation and state towards the future.

Keywords: Pancasila, Ideologi, National Values, Identity Indonesia.

Abstrak

Peran penting Pancasila sebagai akar ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pancasila dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia, mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan yang diakui oleh Pancasila, serta menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis historis dan studi literatur untuk menyelidiki perkembangan konsep Pancasila sebagai ideologi utama Indonesia. Menganalisis terhadap teks-teks sejarah, pidato-pidato penting, dan karya-karya tokoh-tokoh nasional, penelitian ini mengungkap evolusi dan pemaknaan nilai-nilai kebangsaan yang melekat dalam Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila telah berperan sebagai fondasi ideologis yang mendasari identitas kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa terbukti menjadi pilar utama dalam membentuk karakter bangsa dan negara. Juga mengungkapkan bahwa Pancasila terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap keberagaman dan inklusivitas. Kesimpulannya bahwa Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Sehingga Pancasila tetap menjadi pijakan yang kuat untuk memandu arah perkembangan bangsa dan negara Indonesia menuju masa depan.

Kata kunci: Pancasila, Ideologi, Nilai-Nilai Kebangsaan, Identitas Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk landasan nilai dan identitas kebangsaan. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa, membutuhkan kerangka ideologis yang

mampu mengakomodasi dan menjaga kebersamaan dalam keragaman tersebut. Pancasila telah menjadi titik awal dan landasan bagi pembentukan ideologi negara serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara yang merupakan nilai atau norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara, khususnya mengatur kehidupan pemerintahannya. Pancasila juga merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah moral maupun hukum negara juga merupakan sumber dari hukum dasar baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi) dan Pancasila sebagai realitas atau kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Pancasila merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, juga merupakan hasil dari ilmu hukum empiris atau ilmu pengetahuan yang mengkaji fakta-fakta tentang kehidupan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Pancasila menggambarkan *das sollen* dan *das sein* dalam ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) Menganalisis bagaimana konsep pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam sila-sila Pancasila; (2) Menguji kesesuaian antara pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dalam pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang diakui oleh Pancasila; (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara yang merupakan nilai atau norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara, khususnya mengatur kehidupan pemerintahannya dan Pancasila sebagai realitas atau kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya, yang tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa dan negara Indonesia. Pertanyaan kunci yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya sebagai pijakan ideologi bangsa dan negara?
2. Bagaimana hubungan antara Pancasila sebagai ideologi dasar dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana Pancasila mempengaruhi persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks sejarah dan perkembangan sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, analisis historis dan studi literatur untuk menginvestigasi perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya terkait Pancasila sebagai asal mula ideologi bangsa dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian mendalam terhadap perkembangan sejarah, aspek ideologis, dan pengaruh Pancasila dalam membentuk identitas kebangsaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk teks sejarah, pidato tokoh-tokoh nasional, dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, ideologi, dan nilai-nilai kebangsaan. Cara mengumpulkan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pencarian literatur terkait Pancasila, ideologi, dan nilai-nilai kebangsaan dari sumber sumber akademik, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi terkait.
2. Mengidentifikasi teks sejarah, pidato, dan tulisan penting yang berkaitan dengan konsep pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara (*das sollen*), kondisi Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya (*das sein*), serta implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam sejarah Indonesia.
3. Mengkaji dokumen-dokumen penting, seperti Konstitusi Indonesia, pidato-pidato presiden, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
4. Mengkaji karya-karya intelektual dan pemikiran dari tokoh-tokoh nasional yang berbicara tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
5. Mengkaji hubungan antara perkembangan sosial dan politik dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang diakui oleh Pancasila.

Sedangkan analisis data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara membandingkan konsep pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dengan kondisi Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya serta implementasi nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan antara idealisme dan kenyataan akan diidentifikasi dan dianalisis dalam konteks sejarah, sosial, dan politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Pendukung

Bila dilihat secara harfiah (*Etimologis*) “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti lima, dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah “sila” juga bisa berarti sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral. Istilah Pancasila menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH telah dikenal sejak zaman kerajaan Mojopahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Negarakertagama* Karangan Empu Prapanca, dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku *Sutasoma* ini istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta) dia juga mempunyai arti pelaksanaan Kesusilaan yang lima, (Pancasila Krama), yang meliputi:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa)
2. Tidak boleh mencuri (asteya)
3. Tidak boleh berjiwa dengki (Indriva nigraha)
4. Tidak boleh berbohong (amrswada)
5. Tidak boleh mabuk minuman keras (dama). (Dardji Darmodihardjo, et.al: 15).

Selain itu dalam kitab *Sutasoma* juga terdapat semboyan “Bhinneka Tunggal Eka Tan hana dharma mangrua” yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu juga, Yang kemudian menjadi moto negara kita, yakni “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung pengertian berbeda-beda tapi tetap satu. Setelah tenggelam dalam proses penjajahan yang berkepanjangan, selanjutnya istilah Pancasila tersebut diangkat lagi kepermukaan oleh Bung Karno, yaitu dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal 1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Pada hal

yang lebih tepat bahwa pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dasar Negara Indonesia. Dan Dasar Negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Nama Pancasila itu sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam Pembukaan UUD 1945, maupun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu sendiri. Namun demikian cukup jelas, bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima dasar Negara kita sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, alenia ke empat, yang berbunyi:

1. Ke-Tuhanan Yang Mahas Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hal tersebut diperkuat pula dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (Kaelan, 2004: 26-27). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu : “panca” yang artinya “lima” dan “syila” dengan vokal pendek yang artinya “batu sendi”, atau “alas”, atau “dasar, dan “syiila” dengan vokal panjang, yang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.(Kaelan, 2004:21). Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh sebab itu secara etimologi kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal pendek yang memiliki makna “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf panjang, berarti lima aturan tingkah laku yang penting (Yamin, 1960: 437).

Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu Sistem Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan sila kelima adalah merupakan cita-cita, harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan agar terwujud dalam masyarakat dengan ungkapan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tenteram karta raharja, dengan penuh harapan terealisasi dalam segenap tingkah laku dan perbuatan bagi setiap manusia Indonesia. Selanjutnya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Namun nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan serta saling melengkapi, serta tidak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lainnya. Sehingga nilai Pancasila itu merupakan nilai yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Demikian pula nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai, ia dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik, karena antara sila yang satu dengan yang lainnya dalam Pancasila itu saling mengklafikasi saling berkaitan dan berhubungan secara erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi, kemudian nilai-nilai tersebut mempunyai urutan yang sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu sebagai berikut: Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan nilai yang tertinggi, karena nilai ke Tuhanan adalah bersifat mutlak. Baru kemudian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan nilai ke Tuhanan, karena manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan bila dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi dari pada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam sila ke tiga lainnya, yaitu sila Persatuan, sila Kerakyatan dan sila

Keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pokok-pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, bahwa . . . “ negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ke tiga sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Nilai persatuan dipandang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial, karena persatuan adalah merupakan syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya rasa keadilan.
2. Sedangkan nilai kerakyatan yang didasari oleh nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan dan nilai Persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai dari keadilan sosial, karena Kerakyatan adalah sarana terwujudnya suatu Keadilan sosial,
3. Sementara nilai yang terakhir adalah nilai Keadilan sosial, yang merupakan tujuan akhir dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda, dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda pula, namun secara keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan, dan tidak saling bertentangan. Dan oleh sebab itu perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara *etimologis* Istilah ideologi berasal dari kata “*idea*”, yang dapat diartikan sebagai “gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita”, serta “*logos*” yang berarti “ilmu”. Sedangkan kata “*idea*” itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*eidos*”, yang berarti bentuk. Disamping itu ada pula kata “*Idein*” yang berarti melihat. Maka secara harfiah ideologi dapat diartikan dengan ilmu pengertian-pengertian dasar, yang dalam keseharian “*idea*” disamakan artinya dengan cita-cita. Yaitu cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita tersebut sekaligus menjadi dasar, menjadi pandangan atau faham. (Kaelan, Achmad Zubaidi, 2007: 30). Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa pengertian ideologi secara harfiah adalah “*Ideologi a system of ideas*”, yang maksudnya suatu rangkaian ide terpadu menjadi satu. Atau “*System of thought*” yaitu suatu sistem pemikiran. (Margono, dkk, 2002: 74).

Sementara menurut *The Advanced Learner's Dictionary*, Ideologi adalah “*system of idea for a political or economic theory*” atau suatu sistem dari *idea-idea* atau hasil pemikiran yang telah dirumuskan untuk teori politik atau ekonomi. Sedangkan menurut *The Webster's New Collegiate Dictionary*, adalah:

1. *Manner or content of thinking characteristic of an individual or class*. Artinya adalah cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas.
2. *The intellectual pattern of any widespread culture or movement*. Maksudnya adalah suatu pola pemikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan. (Sukarna, 1981: 1).

Istilah ideologi pertama kalinya dilontarkan oleh seorang filosof berkebangsaan Perancis, yang bernama *Antoine Destutt de Tracy* pada tahun 1796, sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. (Christenson, dkk, 1971: 3). *Tracy* menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai “*Science of idea*”. Di mana gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis. Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut “*one great system*” (Pranarka, 1987).

Di samping beberapa pengertian seperti tersebut di atas, terdapat banyak lagi pengertian ideologi yang dikemukakan oleh para pakar, yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. (Poespowardjo, 1992: 47).
2. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa, yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan, untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. (Mubyarto, 1992: 239).
3. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya, kemudian juga usaha dapat diundangkannya secara legal, dan dihubungkan dengan suatu badan kelembagaan, yang didirikan untuk merealisasikan pola kepercayaan tersebut. (Tjokroamidjojo, 1992: 285).
4. Ideologi sebagai seperangkat gagasan, yang menjelaskan atau melegitimasi tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup, dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas, di mana ideologi itu muncul. (Newman, 1973: 52).
5. Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Dengan demikian ideologi merupakan seperangkat prinsip pengarah (*guiding principle*) yang dijadikan dasar. Memberi arahan dan tujuan yang akan di capai di dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara, serta mencakup seluruh aspek eksistensi manusia. (Anthony dalam Cheppy dan Suparlan, 1982).

Dari berbagai pengertian Ideologi seperti dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide dasar masyarakat, bangsa, yang dijadikan pegangan, dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menggambarkan analisis tentang konsep *das sollen* dan *das sein* yang terkait dengan Pancasila sebagai asal mula ideologi bangsa dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan. Berikut adalah beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Konsep pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai kenyataan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya sebagai pijakan ideologi bangsa dan negara adalah;
 - a. Bahwa nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, pemikiran kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
 - b. Bahwa nilai-nilai pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. Nilai-nilai Pancasila adalah merupakan cita-cita tentang kebaikan, yang menjadi suatu kenyataan
2. Hubungan antara Pancasila sebagai ideologi dasar dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia adalah;
 - a. Pancasila secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk

mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

- b. Pancasila merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Dengan demikian nilai-nilai ideologi merupakan seperangkat prinsip pengarah (*guiding principle*) yang dijadikan dasar. Memberi arahan dan tujuan yang akan di capai di dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara, serta mencakup seluruh aspek eksistensi manusia.
 - c. Pancasila sebagai seperangkat gagasan, yang menjelaskan atau melegalisasi tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup, dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas, di mana ideologi itu muncul.
3. Pancasila mempengaruhi persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks sejarah dan perkembangan sosial adalah;
- a. Pancasila, sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, telah memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks sejarah, Pancasila didefinisikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencakup lima sila atau prinsip dasar. Nilai-nilai dalam Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan kesatuan nasional, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, politik, dan budaya di Indonesia.
 - b. Pancasila mempengaruhi persepsi nilai-nilai kebangsaan dengan memberikan panduan yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh warga negara. Misalnya, sila pertama tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sementara sila kedua hingga kelima berbicara tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Ini mempengaruhi cara orang Indonesia memahami dan mengekspresikan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan persaudaraan.
 - c. Pancasila juga mempengaruhi pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kebijakan pemerintah dan praktik masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah sering kali didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kebijakan ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata adalah cerminan dari sila keadilan dalam Pancasila. Demikian juga dalam bidang pendidikan, Pancasila mempengaruhi pembentukan kurikulum yang mendorong pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
 - d. Pancasila juga beradaptasi dengan perkembangan sosial. Misalnya, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pegangan dalam mempertahankan identitas nasional. Di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi, Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan dalam memanfaatkan teknologi dengan etika yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembahasan akan menganalisis temuan-temuan di atas dengan merujuk pada teori-teori pendukung seperti teori konsensus dan teori integritas. Berikut adalah tabel yang mengilustrasikan hubungan antara hasil penelitian, teori-teori pendukung, dan konsep-konsep terkait:

Tabel 1. Data Ilustrasi

No	Teori Pendukung	Konsep Terkait	Kaitan dengan Temuan Penelitian
1	Teori Konsensus	Kesepakatan dan persetujuan dalam membentuk identitas nasional	Pancasila sebagai landasan nilai bersama untuk persatuan dalam keragaman.

2	Teori Konsensus	Kesulitan mencapai konsensus sesuai dengan idealisme	Perbedaan pandangan mengenai interpretasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat.
3	Teori Integritas	Keselarasn antara nilai-nilai dan tindakan nyata	Gap antara nilai-nilai yang diharapkan dalam Pancasila dan implementasi dalam realitas masyarakat.
4	Teori Integritas	Tantangan menjaga keselarasn dalam kompleksitas kehidupan	Tantangan mengurangi kesenjangan (gap) antara idealisme dan praktik nilai-nilai kebangsaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas konsep *das sollen*, *das sein*, dan kesenjangan (*gap*) dalam konteks Pancasila sebagai asal mula ideologi bangsa dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia mengandung konsep *das sollen* yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diharapkan mewujudkan masyarakat adil, demokratis, dan berkeadilan. Sila-sila Pancasila menggambarkan cita-cita luhur untuk persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan yang berkeadilan.
2. Meskipun Pancasila memiliki konsep *das sollen* yang tinggi, implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam realitas masyarakat sering menghadapi tantangan. Faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dapat mempengaruhi implementasi yang tidak selalu sejalan dengan harapan ideal. Terdapat kesenjangan (*gap*) antara visi ideal dan praktik sehari-hari dalam masyarakat.
3. Teori-teori pendukung seperti teori konsensus dan teori integritas memberikan pandangan yang relevan terkait perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Teori konsensus menyoroti tantangan mencapai persetujuan dalam kerangka nilai-nilai bersama, sementara teori integritas menegaskan pentingnya keselarasn antara nilai-nilai dan tindakan nyata.
4. Perbedaan antara konsep *das sollen*, *das sein*, dan *gap* dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan memiliki dampak yang signifikan terhadap identitas kebangsaan Indonesia. Pengenalan *gap* ini memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan, memperkuat dialog antar budaya, dan mendorong upaya meminimalkan kesenjangan antara idealisme dan kenyataan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan nilai-nilai kebangsaan, diperlukan upaya kolektif dalam mengurangi kesenjangan antara konsep *das sollen* dan kondisi *das sein* dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memahami tantangan dan peluang dalam mengaplikasikan Pancasila sebagai asal mula ideologi bangsa dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang. Pancasila memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks sejarah dan perkembangan sosial Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila memberikan arah bagi individu, masyarakat, dan pemerintah untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam tindakan nyata. Dalam sejarah dan perkembangan sosial, Pancasila tetap relevan dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan mewujudkan tujuan-tujuan kebangsaan. Kesimpulan ini juga menegaskan perlunya terus mendalami dan mendorong refleksi nilai-nilai kebangsaan dalam rangka membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian jurnal ini. Saya menyadari bahwa tanpa

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan jurnal ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agus Hasan S Reksoprodjo, ST., DIC selaku dosen Pembimbing Prodi Peperangan Asimetris, dukungan serta masukan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Fauzia Gustarina Cempaka Timur, S.IP., M.Si (Han) selaku dosen Pembimbing Prodi Peperangan Asimetris, dukungan serta masukan kepada penulis.
3. Seluruh teman-teman Mahasiswa/I Prodi Peperangan Asimetris angkatan 11 (2023)
4. Last but not least, untuk diri saya sendiri.

Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, Penulis menyadari dalam penulisan jurnal ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, T. (2019). *The Role of Pancasila in Shaping the Indonesian Nation's Identity*. *Journal of Southeast Asian Studies*, 20(2), 123-140.
- Aswar, A. (2018). Peran Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sarjo. *EDU CIVIC*, 6(02), 12-24.
- Darusman, Y. M. (2018). *Pancasila As The Fundamental Norm In The Unity State Of The Republic Of Indonesia (The Theortically Study Legal Hierarchy by Hans Nawiasky)*. International Conference on Social Humanities, Economics, and Law, 1-14. Universitas Andalas.
- Handayani, I. G. A. M., & Muliawan, I. W. (2022). *Pancasila Values and National Identity: A Study on Multiculturalism in Indonesia*. *Society and Development*, 2(1), 59-73.
- Hardoko, A. (2019). *Pendidikan Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Malang: Elang Mas.
- Luthan, A. M. (2018). Pancasila sebagai ideologi terbuka: Suatu alternatif pemikiran kebangsaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 372-386.
- M. Alwi Kaderi (2015). Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi, 71-117
- M. Nurul Huda (2019), Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan . *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Marhamah Ika Putri (2021), Artikel "Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara Indonesia", Tersedia dalam <https://tirto.id/gjhs>
- Muhaimin (2019), [Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia: Tantangan dan Solusi]. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Muhammad Fauzan (2018), [Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia: Tinjauan Historis dan Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan]. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Muhammad Iqbal (219), Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Sebuah Refleksi Historis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Nurdin, A. R., & Iqbal, M. (2018). *Pancasila's Challenge to Revitalize Nationalism in Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 101-114.
- Nurdin, H. (2016). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Kajian *Hermeneutik* Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 51-69.
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. In A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia*; Digital Library, 15 Oktober 2019 (hal. 95-102). Diambil dari <http://digilib.unimed.ac.id/37502/>

- Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2022). Nasionalisme Warga Muda Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(1), 66–75. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33214>
- Nurgiansah, T. H., Hendri, H., & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Prastyo, D. D., & Kristiawan, M. (2021). *The Role of Pancasila in Enhancing National Resilience: A Study on Indonesian Youth*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 16-28.
- Putra, A. A. G. (2020). *Relevance of Pancasila as the State Ideology in Contemporary Indonesia*. *Veritas et Justitia*, 10(2), 274-290.
- Rachman, F. (2017). *Pancasila and Political Islam in Indonesia: Challenges in Practicing Religious Freedom and Tolerance*. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 337-358.
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Rahardjo, S. (2019). *Pancasila and National Identity in Indonesia: A Historical and Philosophical Approach*. *International Journal of Humanities and Social Science*, 9(8), 99-105.
- Rahmat Hidayat (2020), Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Nilai-Nilai Kebangsaan . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Ramage, D. E. (2019). *Pancasila and Ethno-religious Diversity in Indonesia*. *Asian Ethnicity*, 20(3), 365-379.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1432>
- Suyatno, P. (2017). Pancasila sebagai dasar negara: Pemikiran dan perdebatan. Kencana.
- Wardana, I. K. A. (2020). *Pancasila as the Source of Values in Building Character Education in Indonesia*. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(3), 272-288.